

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan lima indikator sebagai berikut.

1. Relative Advantage (Keunggulan Relatif) menunjukkan bahwa penerapan SIAK memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan sistem pelayanan sebelumnya. Penggunaan SIAK mampu mempercepat proses pelayanan, mempermudah pencarian data kependudukan, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi penggunaan dokumen secara manual. Selain itu, masyarakat juga merasakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien.
2. Compatibility (Kesesuaian) menunjukkan bahwa penerapan SIAK telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, prosedur pelayanan administrasi kependudukan, serta kebutuhan masyarakat. Sistem yang digunakan telah mendukung pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

mampu mengintegrasikan seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan dalam satu sistem yang terhubung dengan basis data nasional.

3. Complexity (Kerumitan) menunjukkan bahwa penggunaan SIAK relatif mudah dipahami dan dioperasikan oleh aparatur setelah mengikuti pelatihan serta terbiasa menggunakan sistem dalam pelayanan sehari-hari. Meskipun masih ditemukan kendala berupa gangguan jaringan internet, server pusat, serta perlunya adaptasi bagi pegawai baru dan masyarakat yang belum memahami pelayanan berbasis digital, kendala tersebut dapat diatasi melalui pelatihan, pendampingan, dan koordinasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelayanan secara keseluruhan.
4. Trialability (Kemungkinan Dicoba) menunjukkan bahwa sebelum diterapkan secara penuh, SIAK telah melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, simulasi penggunaan sistem, serta pendampingan kepada petugas. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada aparatur untuk memahami penggunaan aplikasi sebelum digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga implementasi SIAK dapat berjalan dengan baik.
5. Observability (Kemudahan Diamati) menunjukkan bahwa manfaat penerapan SIAK dapat diamati secara nyata baik oleh

aparatur maupun masyarakat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kecepatan pelayanan, kemudahan pengelolaan dan pencarian data, tertibnya proses administrasi kependudukan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, hasil penerapan SIAK dapat dirasakan secara langsung dan menjadi bukti bahwa inovasi tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, berdasarkan kelima indikator Difusi Inovasi menurut Everett M. Rogers, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet dan server pusat, kendala tersebut tidak mengurangi manfaat utama yang diperoleh dari penerapan SIAK dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, akurat, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terutama dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi, seperti peningkatan stabilitas jaringan internet dan koordinasi dengan pengelola server pusat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada pegawai agar mampu mengikuti perkembangan dan pembaruan sistem sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK secara optimal dengan memahami prosedur dan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan data kependudukan yang benar dan segera melaporkan apabila terjadi perubahan data sehingga database kependudukan tetap akurat dan mutakhir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, transformasi digital, atau efektivitas sistem informasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian atau membandingkan implementasi SIAK di beberapa daerah sehingga diperoleh gambaran

DAFTAR PUSTAKA

- Cousins, B. L., & Earl, L. M. (1995). *Participatory Evaluation in Education: Studies in Evaluation*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth). SAGE Publications Inc.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dinas Dukcapil Bojonegoro. (2024). *Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dinas Dukcapil Jatim. (2024). *Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Jawa Timur*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: A Political Economy Approach*. Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2018). *sixth edition: Public Policy Analysis an Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, I., Alamsyah, A., & Nugraha, M. (2024). Evaluasi Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 104-118.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kemendagri. (2024). *Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian DalamNegeri.(2020).*LaporanReformasi Administrasi Kependudukan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
- Malena, C. (2004). *Social Accountability: An Introduction to the*

- Concept and Emerging Practice*. World Bank.
- McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (1999). *Logic Models: A Tool for Telling Your Program's Performance Story*. American Journal of Evaluation, 20(2), 201-212.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications Inc.
- Nurcholis, H. (2011). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- PANRB. (2020). *Inovasi Pelayanan Publik: Mal Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Badan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan
- Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2019). Transformasi digital dalam birokrasi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *World Population Prospects 2022*. New York, NY: United Nations.
- World Bank. (2023). *The Global Identification Challenge*. Washington, DC: World Bank Group

